e-ISSN 2798-8260

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025, Page: 1-10

# Merancang Masa Depan Birokrasi: Strategi Budaya Organisasi Untuk Keberhasilan SPBE di Gorontalo

**Jorry Karim*, Rauf A. Hatu, Sastro Mustapa Wantu, Zuchri Abdussamad**

Universitas Negeri Gorontalo

**Abstrak:** Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Namun, tantangan budaya organisasi, seperti integritas, profesionalisme, dan komitmen perangkat daerah, menjadi hambatan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran budaya organisasi dalam mendukung implementasi SPBE.Hasil menunjukkan integritas perangkat daerah perlu diperkuat melalui pengawasan dan pelatihan, sementara profesionalisme menghadapi tantangan berupa kesenjangan kompetensi teknis. Komitmen perangkat daerah terhadap transformasi digital juga membutuhkan peningkatan melalui budaya kerja kolaboratif. Sinergi antara integritas, profesionalisme, dan komitmen terbukti menjadi kunci keberhasilan SPBE.Penelitian merekomendasikan pengawasan yang lebih baik, pelatihan digital, dan integrasi budaya organisasi dalam kebijakan SPBE untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Birokrasi, Strategi, Organisasi

DOI: https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2293
*Correspondence: Jorry Karim
Email: oyie.potlot@gmail.com

Received: 21-04-2025
Accepted: 21-05-2025
Published: 22-06-2025

**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

***Abstract:*** *Implementation of an Electronic Based Government System (SPBE) is a strategic step to improve the quality of public services in Gorontalo Province. However, organizational culture challenges, such as integrity, professionalism and commitment of regional officials, are the main obstacles. This research uses a qualitative approach to analyze the role of organizational culture in supporting the implementation of SPBE. The results show that the integrity of regional apparatus needs to be strengthened through supervision and training, while professionalism faces challenges in the form of technical competency gaps. Regional officials' commitment to digital transformation also requires improvement through a collaborative work culture. The synergy between integrity, professionalism and commitment has proven to be the key to SPBE's success. Research recommends better supervision, digital training and integration of organizational culture in SPBE policies to create transparent and accountable public services.*

***Keywords****: Bureaucracy, Strategy, Organization*

## Pendahuluan

Transformasi birokrasi telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam era digital yang semakin berkembang, upaya untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. SPBE diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan zaman. Namun, implementasi SPBE tidak hanya memerlukan dukungan teknologi, tetapi juga

membutuhkan fondasi budaya organisasi yang kuat di kalangan perangkat daerah. Hal ini menjadi kunci dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan di sektor pelayanan publik.

Budaya organisasi memiliki peran penting dalam keberhasilan transformasi birokrasi. Elemen-elemen seperti integritas, profesionalisme, dan komitmen menjadi pilar utama dalam membangun budaya organisasi yang mendukung perubahan (Syahrani & Hernawaty, 2022). Integritas diperlukan untuk memastikan bahwa perangkat daerah menjalankan tugas dengan jujur dan berorientasi pada kepentingan publik. Profesionalisme menjadi landasan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Sementara itu, komitmen menjadi elemen yang menguatkan dedikasi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi organisasi (Chen, 2021). Ketiga elemen ini, jika diimplementasikan secara konsisten, dapat menjadi katalisator keberhasilan SPBE.

Di Provinsi Gorontalo, upaya untuk menerapkan SPBE telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Namun, implementasi SPBE di Gorontalo masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dengan praktik di lapangan. Meskipun regulasi dan perangkat hukum telah tersedia, pelaksanaannya sering kali terkendala oleh faktor sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung digitalisasi. Dalam konteks ini, budaya organisasi menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan transformasi birokrasi (Syafikruzi, 2022).

Integritas perangkat daerah di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sebagai salah satu elemen budaya organisasi, integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mencakup komitmen moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam konteks digitalisasi pelayanan publik, integritas menjadi semakin penting karena berhubungan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan (Cahyarini, 2021).

Selain integritas, profesionalisme perangkat daerah juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi SPBE. Profesionalisme mencerminkan kemampuan dan kompetensi individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, di Provinsi Gorontalo, profesionalisme perangkat daerah masih menghadapi berbagai kendala (Bouckaert, 2019). Salah satu kendala utama adalah kesenjangan antara kompetensi pegawai dengan kebutuhan spesifik digitalisasi. Banyak perangkat daerah yang belum memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem berbasis elektronik. Padahal, profesionalisme yang tinggi diperlukan untuk mencapai target implementasi SPBE secara efektif.

Komitmen perangkat daerah merupakan elemen budaya organisasi lainnya yang memegang peranan penting dalam transformasi birokrasi. Komitmen mencerminkan dedikasi dan loyalitas individu terhadap tujuan organisasi (Sawir, 2020). Dalam konteks

SPBE, komitmen perangkat daerah menjadi indikator keberhasilan penerapan sistem ini. Di Provinsi Gorontalo, komitmen perangkat daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman tentang pentingnya SPBE, resistensi terhadap perubahan, dan minimnya dukungan dari pimpinan organisasi. Untuk itu, penguatan komitmen melalui pembentukan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif menjadi langkah yang sangat diperlukan (Akbar et al., 2021).

Sinergi antara integritas, profesionalisme, dan komitmen merupakan kunci dalam mendorong keberhasilan implementasi SPBE di Provinsi Gorontalo. Ketiga elemen ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus saling mendukung dalam menciptakan budaya organisasi yang kondusif. Dalam implementasi SPBE, sinergi ini perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang terintegrasi, seperti pelatihan berbasis digital, penguatan mekanisme pengawasan, dan pembentukan tim kerja yang kolaboratif (Pratiwi et al., 2022).

Provinsi Gorontalo memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi implementasi SPBE. Sebagai salah satu provinsi yang sedang berkembang, Gorontalo menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung transformasi digital, tantangan geografis dan keterbatasan anggaran sering kali menjadi hambatan. Selain itu, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam akses terhadap teknologi informasi juga menjadi isu yang perlu diatasi (Zang, 2020). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan budaya organisasi di setiap perangkat daerah.

Fenomena yang terjadi di Gorontalo menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi birokrasi menuju digitalisasi memerlukan pendekatan yang holistik(Awaludin, 2019). Hal ini mencakup penguatan integritas, profesionalisme, dan komitmen perangkat daerah, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung. Sebagai contoh, beberapa perangkat daerah telah memulai inisiatif digitalisasi pelayanan publik, namun masih terkendala oleh resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemahaman tentang manfaat SPBE (Galigo, 2023). Untuk itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan budaya kerja yang inovatif, dan pembentukan kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan (Maulana & Dečman, 2023).

Transformasi birokrasi menuju digitalisasi bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan pendekatan yang tepat, tantangan yang dihadapi dapat diatasi (Hartanti, 2023). Budaya organisasi yang berbasis integritas, profesionalisme, dan komitmen menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung perubahan ini. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan, teknologi, dan budaya organisasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo (Scholz, 2021).

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena budaya organisasi dalam konteks transformasi birokrasi terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini berfokus pada upaya mengeksplorasi dan menganalisis dinamika budaya organisasi, khususnya aspek integritas, profesionalisme, dan komitmen perangkat daerah dalam mendukung keberhasilan SPBE.

Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa teknik. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan, terutama terkait perilaku dan pola kerja perangkat daerah dalam mengimplementasikan SPBE. Wawancara mendalam dilakukan dengan para informan yang terdiri atas pejabat pemerintah daerah, staf perangkat daerah, dan pihak- pihak terkait lainnya. Tujuan wawancara ini adalah menggali perspektif, pengalaman, dan tantangan yang mereka hadapi dalam proses transformasi birokrasi berbasis elektronik. Selain itu, peneliti juga melakukan telaah dokumentasi terhadap berbagai regulasi, kebijakan, laporan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan implementasi SPBE.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Peneliti berupaya menemukan pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan tujuan penelitian (Juliana, 2021). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran budaya organisasi dalam mendukung transformasi birokrasi berbasis elektronik, sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Gorontalo menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius, terutama pada aspek integritas, profesionalisme, dan budaya organisasi. Pada aspek integritas, kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi dan kode etik pelayanan publik digital masih memerlukan penguatan. Sebagian besar perangkat daerah memiliki pemahaman yang terbatas terhadap regulasi SPBE, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak berjalan maksimal. Selain itu, rendahnya frekuensi pelatihan atau sosialisasi terkait kode etik pelayanan publik digital turut menjadi kendala. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung layanan digital juga belum optimal, terlihat dari minimnya laporan terbuka mengenai proses layanan digital dan belum tersedianya mekanisme pelaporan berbasis digital yang mudah diakses masyarakat (Daryono, 2019).

Aspek profesionalisme juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam kesesuaian kompetensi perangkat daerah dengan kebutuhan implementasi SPBE. Hanya sebagian kecil perangkat daerah yang memiliki sertifikasi terkait teknologi informasi, sementara tingkat pemahaman teknis terhadap sistem SPBE masih rendah, khususnya di tingkat staf operasional. Meski penerapan standar operasional prosedur (SOP) terkait layanan digital mulai dilakukan, tingkat kepatuhan terhadap SOP ini masih bervariasi antar perangkat daerah, menunjukkan perlunya pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif untuk memastikan keseragaman implementasi (Normile, 2021).

Budaya organisasi menjadi elemen penting dalam mendukung transformasi digital, namun penelitian menemukan bahwa penanaman nilai-nilai budaya kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi belum merata di seluruh perangkat daerah. Meskipun jumlah kegiatan internal yang mempromosikan inovasi dan kerja sama meningkat, tingkat partisipasi perangkat daerah dalam kegiatan tersebut masih rendah. Selain itu, kepemimpinan yang diharapkan mampu mendorong budaya organisasi pro-digitalisasi belum sepenuhnya memenuhi harapan (Lerman, 2019). Banyak perangkat daerah merasa bahwa pimpinan masih lebih fokus pada pendekatan konvensional dibandingkan dengan mendukung transformasi digital secara aktif.

Sinergi antara integritas, profesionalisme, dan komitmen juga menunjukkan tantangan tersendiri. Kolaborasi antar perangkat daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi SPBE belum berjalan optimal. Forum-forum koordinasi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga frekuensi kolaborasi lintas sektor masih rendah (Setyowati, 2024). Kebijakan SPBE juga belum sepenuhnya mencerminkan integrasi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan komitmen, meskipun upaya ke arah tersebut mulai terlihat. Perlu adanya peningkatan keselarasan antara kebijakan SPBE dengan prinsip-prinsip integritas dan profesionalisme, serta penguatan komitmen perangkat daerah untuk mendukung keberhasilan implementasi SPBE.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SPBE sangat bergantung pada penguatan integritas, profesionalisme, dan budaya organisasi. Sinergi yang terintegrasi di antara ketiga aspek ini menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi birokrasi berbasis digital yang efektif dan efisien. Upaya berkelanjutan, seperti peningkatan kapasitas perangkat daerah, penguatan kepemimpinan yang pro-digitalisasi, dan pengembangan mekanisme monitoring serta evaluasi yang terintegrasi, sangat diperlukan agar SPBE dapat memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik di Provinsi Gorontalo (Budisusetio, 2019).

**Pembahasan**

Penelitian ini menguraikan hasil analisis mendalam terkait integritas, profesionalisme, budaya organisasi, serta sinergi di kalangan perangkat daerah dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Gorontalo. Setiap subfokus dianalisis berdasarkan indikator dan deskriptor yang telah ditetapkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi yang ada dan rekomendasi perbaikan yang relevan.

**1. Integritas**

Integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis elektronik. Berdasarkan deskriptor pertama, yaitu kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi dan kode etik pelayanan publik digital, ditemukan bahwa tingkat pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi SPBE masih beragam. Beberapa perangkat daerah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap regulasi, namun sebagian lainnya masih kurang memahami aspek teknis dan strategis yang diatur dalam kebijakan SPBE. Kurangnya sosialisasi yang intensif menjadi salah satu penyebab utama hal ini. Dalam indikator frekuensi pelatihan atau sosialisasi terkait kode etik, hasil menunjukkan bahwa pelatihan yang diadakan masih sporadis dan belum mencakup seluruh perangkat daerah. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip transparansi dalam pelayanan digital.

Transparansi dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung layanan digital, sebagai deskriptor kedua, juga menjadi tantangan yang signifikan. Jumlah laporan terbuka mengenai proses layanan digital masih terbatas. Sebagian besar perangkat daerah belum memiliki sistem pelaporan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait keputusan layanan digital secara real-time. Selain itu, keberadaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses juga masih minim. Beberapa perangkat daerah telah mencoba menerapkan mekanisme pelaporan berbasis aplikasi, namun penggunaannya belum optimal akibat keterbatasan teknis dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan integritas, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dalam memperkuat mekanisme pengawasan internal, menyediakan pelatihan yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa perangkat daerah memahami pentingnya regulasi dan kode etik dalam membangun kepercayaan publik terhadap SPBE.

**2. Profesionalisme**

Profesionalisme perangkat daerah menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi SPBE. Pada deskriptor pertama, yaitu kesesuaian kompetensi perangkat daerah dengan kebutuhan implementasi SPBE, ditemukan bahwa jumlah perangkat daerah yang memiliki sertifikasi terkait teknologi informasi masih terbatas. Sebagian besar pegawai belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk mendukung sistem digitalisasi pemerintahan. Tingkat pemahaman teknis terhadap sistem SPBE juga masih rendah, terutama di kalangan perangkat daerah yang berada di wilayah pedesaan. Hal ini menunjukkan perlunya program peningkatan kapasitas yang lebih terarah, seperti pelatihan teknis, sertifikasi, dan pendampingan khusus.

Deskriptor kedua, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten dalam pelayanan publik digital, juga menunjukkan hasil yang perlu ditingkatkan. Meskipun beberapa perangkat daerah telah memiliki SOP yang mengatur layanan digital, namun tingkat kepatuhan terhadap SOP tersebut masih bervariasi. Banyak perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami pentingnya SOP dalam menjamin konsistensi dan efisiensi layanan. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi SOP di lapangan. Dalam beberapa kasus, SOP yang telah

ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga menimbulkan resistensi dari pengguna layanan.

Untuk memperkuat profesionalisme, penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses pelatihan teknis, mendorong sertifikasi bagi pegawai, serta melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP. Pendekatan ini dapat membantu perangkat daerah meningkatkan kompetensinya dalam mendukung implementasi SPBE secara efektif.

**3. Budaya Organisasi**

Budaya organisasi merupakan elemen yang sangat menentukan dalam keberhasilan transformasi digital. Pada deskriptor pertama, yaitu penanaman nilai- nilai budaya kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi, ditemukan bahwa jumlah kegiatan internal yang mempromosikan inovasi dan kerja sama masih terbatas. Beberapa perangkat daerah telah mengadakan lokakarya atau seminar internal, namun tingkat partisipasi pegawai masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kerja yang mendukung inovasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam organisasi. Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam kegiatan budaya organisasi juga menunjukkan adanya kesenjangan, di mana hanya beberapa pegawai yang aktif berpartisipasi, sementara yang lainnya kurang terlibat akibat kurangnya dorongan dari pimpinan.

Deskriptor kedua, yaitu kepemimpinan yang mendorong budaya organisasi pro-digitalisasi, juga menghadapi tantangan. Tingkat kepuasan perangkat daerah terhadap gaya kepemimpinan masih beragam, dengan sebagian pegawai merasa bahwa pimpinan kurang memberikan arahan yang jelas mengenai pentingnya digitalisasi. Persepsi perangkat daerah terhadap dukungan pimpinan terhadap digitalisasi juga bervariasi, di mana beberapa merasa didukung, namun sebagian lainnya merasa bahwa dukungan yang diberikan belum memadai. Kepemimpinan yang kurang visioner menjadi salah satu faktor penghambat dalam membangun budaya organisasi yang pro-digitalisasi.

Untuk memperkuat budaya organisasi, diperlukan kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memotivasi perangkat daerah untuk berinovasi dan berkolaborasi. Selain itu, kegiatan internal yang mempromosikan nilai-nilai budaya kerja pro- digitalisasi perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung transformasi digital.

**4. Sinergi Antara Integritas, Profesionalisme, dan Komitmen**

Sinergi antara integritas, profesionalisme, dan komitmen menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan implementasi SPBE. Pada deskriptor pertama, yaitu kolaborasi antar perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPBE, ditemukan bahwa jumlah forum koordinasi lintas perangkat daerah masih terbatas. Frekuensi kolaborasi pada program lintas sektor juga belum optimal, di mana banyak perangkat daerah yang masih bekerja secara silo tanpa melibatkan unit lain yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan SPBE.

Deskriptor kedua, yaitu integrasi nilai integritas, profesionalisme, dan komitmen dalam kebijakan SPBE, menunjukkan bahwa tingkat keselarasan antara kebijakan SPBE dengan prinsip integritas dan profesionalisme masih perlu ditingkatkan. Banyak kebijakan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga implementasinya sering kali tidak sesuai dengan harapan. Selain itu, jumlah perangkat daerah yang menunjukkan peningkatan komitmen terhadap SPBE masih terbatas, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih strategis dalam membangun komitmen di kalangan perangkat daerah.

Untuk mendorong sinergi yang lebih baik, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan program-program yang mendorong kolaborasi antar perangkat daerah. Selain itu, nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan komitmen perlu diinternalisasi dalam setiap aspek implementasi SPBE untuk memastikan keberhasilan yang berkelanjutan.

### 5. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan SPBE di Provinsi Gorontalo. Pertama, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi dan kode etik pelayanan publik digital. Kedua, program pelatihan dan pengembangan kapasitas berbasis digital perlu ditingkatkan untuk mendukung profesionalisme perangkat daerah. Ketiga, kegiatan internal yang mempromosikan inovasi dan kolaborasi perlu ditingkatkan untuk memperkuat budaya organisasi. Keempat, kebijakan SPBE perlu dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan komitmen.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan implementasi SPBE di Provinsi Gorontalo dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang manusia dan budaya organisasi yang mendukung perubahan tersebut.

## Simpulan

Transformasi birokrasi melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di Provinsi Gorontalo, keberhasilan SPBE sangat bergantung pada peran budaya organisasi, khususnya dalam aspek integritas, profesionalisme, dan komitmen. Berdasarkan hasil penelitian, integritas perangkat daerah masih memerlukan penguatan melalui mekanisme pengawasan dan pelatihan yang lebih terstruktur. Profesionalisme, yang mencakup kompetensi teknis dan penerapan SOP, juga perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan SPBE. Selain itu, komitmen perangkat daerah terhadap visi dan misi digitalisasi harus didukung dengan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif. Sinergi antara ketiga elemen ini menjadi faktor kunci dalam mendorong keberhasilan transformasi birokrasi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah perlu fokus pada integrasi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan komitmen ke dalam kebijakan dan program SPBE. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan pelatihan berbasis digital, penguatan pengawasan internal, dan pembentukan budaya kerja yang mendukung inovasi perlu dilakukan secara konsisten. Dengan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan, implementasi SPBE di Provinsi Gorontalo diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Akbar, G., Rulandari, N., & Widaningsih, W. (2021). Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 4(2), 187–199.

Awaludin, L. (2019). Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (Tik) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe). Paradigma Polistaat: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2(2), 118–134.

Bouckaert, G. (2019). The politics of bureaucracy in the face of different legal futures. *British Journal of Politics and International Relations*, *21*(3), 530–540. https://doi.org/10.1177/1369148119842026

Budisusetio, D. (2019). Human capital strategy model for improving business unit performance, based on environmental turbulence, strategic leadership and organizational culture (A survey on unit business Indonesian telecommunication operator). *Journal of Entrepreneurship Education*, *22*(4). https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85073440484&origin=inward

Cahyarini, F. D. (2021). Implementasi Digital Leadership Dalam Pengembangan Kompetensi Digital Pada Pelayanan Publik. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 25(1), 47–60.

Chen, K. K. (2021). "What if" and "if only" futures beyond conventional capitalism and bureaucracy: Imagining collectivist and democratic possibilities for organizing. *Research in the Sociology of Organizations*, *72*, 1–28. https://doi.org/10.1108/S0733-558X20210000072001

Daryono. (2019). Leadership Culture Organizational Political (LCOP) model: A strategy organizational capability to increase organization performance in Indonesia. *Espacios*, *40*(22). https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85068506080&origin=inward

Galigo, A. (2023). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan Outsourcing Melalui Motivasi Pada Pt Jaya Sakti Prasetya The Influence Of The Work Environment And Information Technology On The Performance Of Outsourced Employees Through Motivation At Pt Jaya Sakti Prasetya.

Hartanti, E. P. (2023). Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Menghadapi Era Society 5.0 Dengan Digitalisasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.

Juliana, C. (2021). Performance implications of misalignment among business strategy, leadership style, organizational culture and management accounting systems. *International Journal of Ethics and Systems*, *37*(4), 509–525. https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2021-0033

Lerman, A. E. (2019). Feedback Effects and the Criminal Justice Bureaucracy: Officer Attitudes and the Future of Correctional Reform. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, *685*(1), 227–249. https://doi.org/10.1177/0002716219869907

Maulana, R. Y., & Dečman, M. (2023). Collaborative Governance In The Digital Transformation Age: A Systematic Literature Review With Bibliometric Mapping. Central European Public Administration Review, 21(1), 31–60.

Normile, D. (2021). China overhauls its public health bureaucracy: Early stumbles in pandemic response prompt new top-level agency to better handle future threats. *Science*, *372*(6544), 779. https://doi.org/10.1126/science.372.6544.779

Pratiwi, Yuwono, Astuti, & Afrizal. (2022). Analisis Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Perspektif.

Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Deepublish.

Syafikruzi, I. H. (2022). Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Kota Pekanbaru. N Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya , 1(2), 132–148.

Scholz, K. K. (2021). Good image during the crisis: Chamber Meeting of the Bremen Chamber of Pharmacists/Optimism for the future - Criticism of too much bureaucracy. *Deutsche Apotheker Zeitung*, *161*(23). https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85108224243&origin=inward

Setyowati, A. (2024). Budget Planning Strategy to Create Organizational Culture: A Case Study on Electrical Service Companies in Indonesia. *Quality - Access to Success*, *25*(198), 121–131. https://doi.org/10.47750/QAS/25.198.13

Syahrani, M., & Hernawaty, H. (2022). Managing Workforce Agility Through Bureaucratic Leadership And Organizational Culture In Public Service Mediated By Psychological Empowerment. Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa, 15(2), 197–212.

Zang, X. (2020). Research on street-level bureaucracy in China: past, present, and future. *Handbook of Public Policy and Public Administration in China*, 378–391. https://doi.org/10.4337/9781789909951.00032